

INVESTASI TURNKEY PROJECT DAN DINAMIKA KEUNTUNGAN DAN TANTANGAN UNTUK PEREKONOMIAN INDONESIA

Mukhammad Ahsin Rozaq
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga
Email : ahsinrq79@gmail.com

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu pendorong meningkatnya PDB suatu negara. Ada berbagai macam bentuk investasi di antaranya adalah investasi *turnkey project*. Investasi ini mengharuskan investor yang masuk ke negara memegang kendali penuh atas proyek yang di kerjakan. Baik dari bahan baku, SDA maupun teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis secara triangular beberapa data yang didapatkan melalui, pengolahan dokumen-dokumen resmi, analisis terhadap berbagai literatur dan pemberitaan media massa. Sebenarnya investasi dalam bentuk ini sangat menguntungkan bagi negara penerima investasi karena tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu dan kualitas serta waktu pekerjaan dapat terjamin dari investor. Masalah lain timbul dari bentuk investasi ini yaitu di karenakan kekuasaan penuh pada suatu investor pelaksana menjadikan hak-hak yang seharusnya dapat di gunakan dan di terima oleh warga negara menjadi terabaikan. Seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, transfer teknologi yang seakan di batasi serta mengesampingkan permasalahan perekonomian di dalam negeri.

Kata Kunci: *Turnkey project*, Investasi Asing, Tenaga Kerja Asing, Keuntungan Dan Tantangan

PENDAHULUAN

Indonesia pada masa sekarang ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang sangat gencar-gencarnya dalam menggenjot pembangunan khususnya masalah Infrastruktur. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 7%. Berbagai Infrastruktur mulai di bangun di antaranya mulai membangun jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik maupun infrastruktur yang lain. Karena ini program nasional yang mana harus di kerjakan otomatis membutuhkan modal yang sangat besar dan tidak mungkin semua program yang sangat besar ini di biayai oleh APBN. Oleh karena itu di butuhkan Investasi dari luar negeri agar program nasional dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu pada awal pemerintahan Jokowi sering melaksanakan safari politik yang mana untuk menjalin kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya khususnya di kawasan Asia. Arab Saudi dan China adalah beberapa negara yang menjadi tujuan safari politik Presiden Jokowi. Untuk menarik Investor masuk ke Indonesia pemerintah juga melakukan perubahan undang-undang terutama dalam hal pemangkasan peraturan perizinan dan kemudahan perizinan tenaga kerja asing melalui peraturan menteri ataupun melalui perpres. Misalkan dalam melakukan perizinan yang mana jika pada era Presiden SBY memerlukan waktu dua tahun di era Jokowi hanya butuh waktu tiga hari. Dengan pemangkasan peraturan ini di harapkan semakin banyak Investor yang mau masuk ke Indonesia.

Benar saja untuk data sepanjang tahun 2017 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) mencapai 692,8 triliun atau melampaui target 678,8 triliun (CNBC Indonesia : 2018). Kepala BPKM Thomas Lembong menjabarkan, realisasi investasi PMA berdasarkan 5 besar asal negara adalah Singapura sebesar USD 8,4 miliar (26,2%), Jepang sebesar USD5,0 miliar (15,5%), China sebesar USD3,4 miliar (10,4%), Hongkong sebesar USD2,2 miliar (6,6%) dan Korea Selatan sebesar USD20 miliar (6,3%).

Dari lima negara dengan investasi terbesar tersebut ada negara China yang mana menempati posisi ke 3 untuk negara yang berinvestasi paling besar. Dalam melakukan investasinya yang para investor China lebih berfokus pada sektor infrastruktur dengan jumlah Rp150,89 triliun untuk sektor kelistrikan atau sebesar 54,36 persen dari total rencana investasi China (cnnindonesia.com 2016). Kemudian, diikuti oleh sektor angkutan kereta api sebesar Rp73,90 triliun (26,62 persen), sektor industri logam dasar Rp16,78 triliun (6,04 persen), sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp13,96 triliun (5,03 persen), serta sektor perdagangan sebesar Rp9,32 triliun (3,36 persen). Selain China, BKPM mencatat negara lainnya yang investornya banyak mengajukan izin prinsip ke BKPM adalah Singapura Rp203,89 triliun dan Jepang sebesar Rp100,64 triliun (Suciliani Oktavia dkk, 2017)

Investasi sektor swasta dari perusahaan China di luar negeri sangat dipantau oleh pemerintahan China, termasuk kerjasama yang terdapat di dalam perjanjian investasi tersebut. Dimana MOFCOM (Ministry of Commerce) dan kementerian lainnya memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor investasi oleh perusahaan China di berbagai wilayah dunia. Selain itu, Departemen Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi juga ditugaskan untuk membimbing, mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan bidang kerjasama ekonomi luar negeri. Sehingga pemerintah China mengambil inisiatif dalam mendirikan zona semacam ini di negara lain, di mana perusahaan mereka dapat memperoleh keuntungan dari eksternalitas positif dari pembangunan infrastruktur, publisitas bersama dan sebagainya (Davies, 2013).

Dalam *White Paper China's Foreign Aid* pada Juli 2014, bantuan luar negeri China dibedakan berdasarkan sumber keuangan yang terdiri dari tiga jenis yakni:

1. *Grant* (hibah)

Hibah terutama digunakan untuk membantu negara-negara penerima untuk membangun proyek kesejahteraan sosial kecil atau menengah seperti rumah sakit, sekolah dan rumah dengan biaya rendah, dan mendukung proyek penggalian sumur atau pasokan air, dan proyek menengah dan kecil untuk kesejahteraan sosial lainnya. Selain itu, hibah digunakan dalam proyek-proyek di bidang kerjasama pengembangan sumber daya manusia, kerjasama teknis, bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan darurat.

2. *Interest-free loan* (pinjaman bebas bunga)

Pinjaman bebas bunga terutama digunakan untuk membantu negara penerima membangun fasilitas umum dan meluncurkan proyek untuk memperbaiki penghidupan masyarakat. Jangka waktu pinjaman tersebut biasanya 20 tahun, termasuk lima tahun penggunaan, lima tahun masa tenggang dan sepuluh tahun pembayaran. Saat ini, pinjaman tanpa bunga terutama diberikan kepada negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang relatif baik.

3. *Concessional loan* (pinjaman konsesional)

Pinjaman konsesional digunakan untuk membantu negara-negara penerima melakukan proyek manufaktur dan proyek infrastruktur besar dan menengah dengan manfaat ekonomi dan sosial, atau untuk penyediaan pabrik, mesin dan produk elektronik secara lengkap. Pinjaman konsesional diajukan oleh Bank Ekspor-Import China di pasar, dan karena bunga pinjaman lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Rakyat China, perbedaan tersebut dibuat oleh Negara sebagai subsidi finansial. Saat ini, tingkat bunga tahunan pinjaman lunak China antara 2% dan 3%, dan jangka waktu pembayaran biasanya 15 sampai 20 tahun (termasuk lima sampai tujuh tahun masa tenggang) (suciliani oktavia dkk, 2017).

Berbagai bantuan luar negeri yang di berikan China menyasar berbagai negara yang termasuk negara miskin dan berkembang. Untuk meningkatkan pembangunan pada sektor ekonomi. Bantuan yang di berikan China menyasar pada proyek tertentu khususnya pada masalah infrastruktur. Berbagai bantuan untuk negara berkembang misalnya China membangun berbagai proyek transportasi, termasuk jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas pasokan energi, China juga membangun stasiun pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas, transmisi tenaga, transformasi dan jaringan distribusi, dan proyek pengeboran panas bumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuntungan Menggunakan Investasi *Turnkey project*

Turnkey project merupakan salah satu kontrak kerja yang di sepakti dalam melakukan bantuan ataupun investasi di berbagai negara termasuk Indonesia. *Turnkey project* adalah sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun ilegal didatangkan dari China (law-justice.co, 2018).

Turnkey umumnya digunakan dalam industri konstruksi, misalnya, di mana ia mengacu pada bundling bahan dan tenaga kerja dengan sub-kontraktor. *Turnkey* sangat mirip dengan kontrak Rancang-Bangun/ Design Build, pada jenis kontrak ini sangat mungkin untuk memisah pekerjaan perancangan dengan pelaksanaan konstruksinya walaupun dilakukan oleh satu penyedia jasa. Penyedia jasa bisa langsung mendapat upah jika menggunakan skema pembayaran termyn sesuai volume pekerjaan yang telah terselesaikan. Kontrak Rancang Bangun / Design Build. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara total (perencanaan dan pelaksanaan). Walaupun mungkin hal ini bermanfaat bagi Pengguna Jasa, namun kurang menguntungkan karena pengawasan kurang pada proses perencanaan dan sulit melakukan perubahan pada pelaksanaan. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas perencanaan sesuai keinginan Pengguna Jasa termasuk semua disiplin (sipil, mekanikal, elektrik, dsb) (Basuki, 2009).

Kontrak non tradisional atau *turnkey* mensyaratkan modal yang sangat besar bagi penyedia jasa karena semua biaya pelaksanaan harus ditanggung mulai dari survey, perijinan ,perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga bangunan bisa beroperasi. Bagi penyedia jasa apapun jenis kontrak yang diajukan tidak ada kendala , karena bagaimanapun target pekerjaan yang hendak dicapai hanya terdiri :

1. Biaya ekonomis (tidak harus biaya terendah)
2. Kualitas pekerjaan (terjaga)
3. Jangka waktu penyelesaian (secepat mungkin)
4. Menguntungkan Pembayaran secara termyn, bukan sekaligus setelah pekerjaan selesai (Basuki, 2009).

Saat ini China sedang menerapkan sistem Investasi *Turnkey project* Management di Indonesia melalalu 1.734 proyek. Kebanyakan proyek ini menggunakan proyek *turnkey* yang mana dalam Proyek ini menggunakan *conceptional loan* atau pinjaman konsensional. Pinjaman ini menggunakan sistem bunga lunak 2-3 % pertahun dengan jangka waktu pembayaran sampai 15 tahun. Dengan ribuan proyek yang akan di laksanakan pasti akan memerlukan pekerja yang tidak sedikit yang mana proyek tersebut dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Di Indonesia pada agustus 2017 sendiri tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,5% dari total angkatan kerja 128,06 juta jiwa. Yang mana TPT paling tinggi di tingkat pendidikan di duduki lulusan SMK(Sekolah Menengah Kejuruan) sebesar 11,41 persen (Badan Pusat Statistik, 2017). Semakin banyak investasi yang masuk di diharapkan semakin menurun pula tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Selain di diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran Investasi *Turnkey* di harapkan pula dapat mentransfer teknologi yang berasal dari luar negeri dan mampu di pelajari dan di operasionalkan di Indonesia. Transfer teknologi merupakan salah satu tujuan dengan di dorongnya investasi. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% berbagai cara di lakukan pemerintah pada era jokowi. Salah satu bidikan dalam menumbuhkan ekonomi yaitu pada sektor pariwisata. Pada sektor ini Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan dan keindahan yang mendunia baik wisata bahari, wisata budaya maupun wisata kuliner Indonesia merupakan surga bagi para turis. Akan tetapi kurang optimalnya pengelolaan dan akses menyebabkan sulit memaksimalkan potensi ini. Untuk itulah dalam pemerintahan jokowi ini menggenjot Infrastruktur demi menunjang aksek ke ndestinas wisata di seluruh nusantara. Baik akses melalui darat, laut maupun udara. Di harapkan dengan adanya perbaikan melalui kerjasama *turnkey projek* ini infrastruktur dapat mencapai target dan turis mancanegara dapat perkunjung ke Indonesia. Sesuai target pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dapat tercapai.

Menurut data yang di keluarkan BPS per januari 2018 menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia November 2017 naik 5,86 persen dibanding jumlah kunjungan pada November 2016, yaitu dari 1,00 juta kunjungan menjadi 1,06 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Oktober 2017, jumlah kunjungan wisman pada November 2017 mengalami penurunan sebesar 8,42 persen. Secara kumulatif (Januari–November) 2017, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,68 juta kunjungan atau naik 21,84 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta kunjungan (Badan Pusat Statistik, 2018) Salah satu hasil dari pembangunan infrastruktur sebagai peningkatan jumlah turis mancanegara.

Kelemahan Menggunakan Investasi *Turnkey project*

Investasi menggunakan *turnkey project* memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi keadaan ekonomi maupun sosial di negara tempat berlangsungnya investasi tersebut. Tak terkecuali Indonesia yang melakukan Investasi tersebut salah satunya dengan negara China. Karena investasi proyek *turnkey project* ini kebanyakan menggunakan proyek

turnkey yang mana dalam Proyek ini menggunakan *conceptional loan* atau pinjaman konsensional. Pinjaman ini menggunakan sistem bunga lunak 2-3 % pertahun dengan jangka waktu pembayaran sampai 15 tahun. Menyebabkan hutang luar negeri Indonesia semakin menumpuk dan bertambah secara signifikan.

Dalam data yang di terbitkan Bank Indonesia(BI) Februari 2018, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US\$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769). Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya (Rafki Hidayat, 2018). Selain meningkatkan jumlah hutang luar negeri Indonesia *turnkey project* juga salah satu investasi yang merugikan dan melanggar Undang-Undang ketenaga kerjaan yang telah ada. Karena dalam proyek ini suatu pengelola mempunyai hak penuh dalam melakukan eksplorasi dalam mengerjakan proyeknya. Termasuk modal, sumber bahan baku bahkan sumber tenaga kerja. Beberapa Undang-undang yang di langgar antara lain:

Kesepakatan *turnkey project* ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 42 hingga 49 dijelaskan bahwa adanya pembatasan penggunaan TKA guna menjamin kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Dimana TKA hanya dapat menduduki jabatan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Nomor 173 Tahun 2000. Serta, selama tenaga kerja Indonesia belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut Oleh karena itu, TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Selain itu, kesepakatan ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, dan membatasinya untuk jabatan dan keahlian tertentu, serta mewajibkan perusahaan penanaman modal (baik dalam negeri maupun asing) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta alih teknologi. Sehingga kebijakan *turnkey project* yang dicanangkan oleh pemerintah China yang mana sebagai pelaksana tidak sesuai dengan jabatan-jabatan yang telah tercantum dalam Permen karena penggunaan tenaga kerja yang di pakai dari manager sampai buruh kasar di impor dari China. Kemudian, tidak memberikan keutamaan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia dan pelatihan kerja atau alih teknologi yang tidak dijalankan oleh investor.

Dalam pelaksanaan Investasi *turnkey project* ini yang mana negara China sebagai pelaksanaanya memberikan beberapa rentetan masalah di antaranya masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok ini diikuti oleh beberapa peristiwa janggal seperti penyelundupan manusia, narkoba dan penanaman bibit sayuran berbakteri, serta pengibaran bendera China di sejumlah kawasan di Indonesia. Kedatangan tenaga kerja asing khususnya China diperkirakan akan semakin marak seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang akan mempermudah kedatangan mereka. Dalam rapat kabinet beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi ingin agar tenaga kerja asing dipermudah masuk Indonesia (Desmond J Mahesa, Law-Justice.co, 2018).

Salah satu kemudahan ini di tunjang juga dengan pengeluaran Perpres no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Dalam Perpres ini ada beberapa kewajiban Tenaga Kerja

Asing yang di hilangkan seperti pasal 10 perpres no 20 tahun 2018 mengatakan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki (RPTKA) rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk memperkerjakan TKA pemegang saham, pegawai diplomatik dan TKA pada jenis pekerjaan yang di butuhkan oleh pemerintah. RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan serta lama penggunaan TKA yang di perlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan IMTA. Sedangkan IMTA sendiri yaitu ijin menggunakan tenaga kerja asing.

Pasal 22 juga menjadi sorotan, dalam pasal ini berbunyi dalam pelaksanaan pekerjaan yng bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat mennggunakan jenis visa dan izin tinggal yang di peruntukkan bagi kegiatan di maksud sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih luas investasi *turnkey project* ini mendatangkan rentetan permasalahan dan gesekan dengan warga pribumi karena akan mengancam tenaga kerja lokal yang akan kehilangan kesempatan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pemaparan dinamikan untung dan rugi penggunaan investasi *turnkey project* penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang salah satunya dengan meningkatka investasi. Baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pemerintah sebagai regulator, pemegang kepentingan dan pemegang kendali akan suatu negara memiliki peran dominan dalam menentukan kebijakan. Salah satunya dalam melakukan kebijakan investasi.

Investasi yang memudahkan para investor salah satunya menggunakan investasi *turnkey project*. Yang mana dalam melakukan investasinya negara pelaksana dalam hal ini negara yng berinvestasi di Indonesia dengan sisten investasi ini adalah China. Sistem ini menggunakan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga di datangkan dari negara pelaksana. Para pelaksana investasi ini juga memiliki tenggang waktu yang telah di tentukan jadi bagaimanapun caranya proyek yang sudah di sepakati harus selasai tepat waktu dan dengan kualitas yang terjamin.

Untuk negara yang mendapat investasi dengan sistem ini memiliki keuntungan di antaranya semua biaya pelaksanaan sudah ditanggung investor mulai dari survey, perijinan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga bangunan bisa beroperasi. Bagi penyedia jasa apapun jenis kontrak yang diajukan tidak ada kendala, karena bagaimanapun target pekerjaan yang hendak dicapai hanya terdiri : Biaya ekonomis (tidak harus biaya terendah), Kualitas pekerjaan (terjaga), Jangka waktu penyelesaian (secepat mungkin), Menguntungkan Pembayaran secara termyn, bukan sekaligus setelah pekerjaan selesai.

Setiap kebijakan selalu menimbulkan dua sisi yang berbeda tak termasuk dalam investasi ini. Investasi *turnkey project* ini memliki kelemahan yaitu investasi ini menggunakan sistem *concepional loan* atau pinjaman konsensional. Pinjaman ini menggunakan sistem bunga lunak 2-3 % pertahun dengan jangka waktu pembayaran sampai 15 tahun. Menyebabkan hutang luar negeri Indonesia semakin meningkat tajam. Selain itu semua bahan baku, mesin-mesin, tenaga yang di butuhkan juga di impor dari negara asal dalam hal ini China, perjanjian ini menyebabkan permasalahan antara pekerja lokal dan pekerja asing serta transfer teknologi yang di harapkan menjadi tidak berjalan sesuai harapan. Banyak pekerkja kasar yang juga di impor dari China yang menyebabkan pengangguran di

Indonesia yang seharusnya menempati posisi tersebut jadi tidak punya kesempatan. Sehingga pengangguran yang di harapkan dapat berkurang dengan adanya investasi baru yang masuk dari luar negeri menjadi sia-sia.

Menyikapi pro kontra untung rugi penggunaan investasi *turnkey project* ada beberapa rekomendasi saran yang dapat di pertimbangkan oleh pemerintah saat ini untuk menyikapi kontra yang di timbulkan oleh proyek ini di antaranya:

1. Pemerintah Jokowi harus menghitung ulang akan kemampuan Indonesia untuk membayar hutang luar negeri dan sesegera mungkin mengevaluasi APBN jangan sampai Indonesia menjadi negara yang bangkrut
2. Mempertegas pengawasan tentang Tenaga Kerja Asing khususnya pekerja Ilegal dari China khususnya saat perjanjian investasi *turnkey project* sedang di laksanakan.
3. Pemerintahan Jokowi harus bisa memastikan bahwa tenaga kerja China harus kembali ke negaranya begitu selesai kontrak kerja. Tidak kemudian dibiarkan beranak pinak di Indonesia yang pada akhirnya nanti mereka menjadi warga negara Indonesia.
4. Membuka keran investasi bagi pribumi yang mampu mengembangkan bisnis di sektor-sektor yang di kuasai pemerintah melalui Investasi padat karya (Desmond J Mahesa, Law-Justice.co, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Basuki. Kajian Sistem Kontrak Turn-Key Ditinjau Dari Aspek Hukum. Teodolita Vol.11, No.2., Des 2009:47-56
- Suciliani Octavia Dan Muhammad Badaruddin, *Turnkey Project Dan Dinamika Pengaturan Ketenagakerjaan Asing Di Indonesia*. Asia Pacific Studies Volume 1 No. 2/ July - December 2017
- Badan Pusat Statistik .Agustus 2017: Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Sebesar 5,50 Persen. 2017-11-06
- Badan Pusat Statistik..Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia November 2017 Mencapai 1,06 Juta Kunjungan.-01-02-2018
- Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 Persen 2018-01-02
- Mahesa, Desmond J. 2018. Solusi Mengatasi Membanjirnya Tenaga Kerja China Di Indonesia. 16 Maret.
- Rafki Hidayat. 2018. Utang Luar Negeri Indonesia Rp4.800 Triliun: Lima Hal Yang Perlu Anda Ketahui. Bbc Indonesia. 13 Maret